

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999.
- A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya)*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- ‘Abd Al-Baqiy, Muhammad Fuad, *Al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur’an Al-Karim*, Dar al-Fikr, Beirut, 1981.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abu Rohmad, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Walisongo Press, Semarang, 2008.
- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_ dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Adrianus Meliala, *Praktis Bisnis Curang*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Bagian Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1992.
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_ dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen- Edisi Revisi*, Cetakan ke-9, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 4, Qisthi Press, Jakarta, 2007.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Keenam, Jakarta, Rajawali Pers.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Andre Ate Ujan, *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018.
- B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Cetakan I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.
- B.R. Rijkschoeff, *Sosiologi Hukum dan Sosiologi Hukum*, Cetakan ke-1, Bandung, Mandar Maju, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Candra Irawan, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keempat, 2014.
- Cristoper W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies, for Resolving Conflict*, Edisi Kedua, Jossey-Bass Publisher, San Fransisco, 1996.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Dory Reiling, *Technology for Justice, How Information Technology can support Judicial Reform*, Leiden University Press, 2009.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan (Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan)*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Edwoud H. Hondius, “*Consumer Redress Schemes: An Outline*” *Consum. L. J.*, 1995.
- Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Tatanusa, Jakarta, 2004.

- Faisal, *Pemaknaan Hukum Progresif untuk Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015.
- Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, susunan Mr. Algra, et.al., Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum (Akar Religiositas Hukum)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Hamid Algar, "Introduction" dalam Sayyid Quthb, *Social Justice in Islam*, trans. B. Hordie, Islam Book Trust, Kuala Lumpur, 2000.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Sixth Edition*, St. Paul Minn West Publishing Co, 1990.
- Howard Raiffa, *The Art & Science of Negotiation*, Harvard University Press, Massachusetts, 1982.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2004.
- I Made Widyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009.
- Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 7, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Bogor, 2004.
- Ihromi, TO., Beberapa Catatan mengenai Metode Sengketa yang Digunakan dalam Antropologi Hukum, dalam *Antropologi Hukum; Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor, Jakarta, 1993.
- Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 2, Penerbit Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2008.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.

- J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Percetakan Gloria, Jakarta, 2001.
- Jimly Assiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia*, dalam *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase)*, Cetakan ke-1, Visi Media, Jakarta.
- John Gilissen dan Frits Golde, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- John Locke, *Second Treatise of Government*, The Sixth edition, The University of Adelaide Library, Adelaide, 2006.
- John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008.
- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, University Press, Oxford, 1964.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan BPSK*, UB Press, Malang, 2011.
- Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah*, Kencana, 2018.
- Larry L. Teply, *Legal Negotiation in a Nutshell*, West Publishing Co, 1992.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Leo Kanowitz, *Alternative Dispute Resolution*, St. Paul, Minnesota USA West Publishing Co, 1985.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

- M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mariam Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005..
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Musa Asya'rie dkk, *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 1994.
- NHT Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Osgar S. Matompo, *Hakikat Hukum Sistem Persaingan Usaha yang Sehat, Kompetitif, dan Berkeadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2. Kencana, Jakarta, 2008.
- Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Priyatna Addurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Fikahati Anesta, Jakarta, 2002.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Angkasa Offset, Bandung, 1981.

- Retnowulan Susantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 2003.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Raharjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Cetakan ke-2, Genta Publishing, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dalam Kerangka Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum, Nomor 1 Tahun 1972.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Jilid 6, Gema Insani Press, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Jilid 10, Gema Insani Press, Jakarta, 2008.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT. Aditya Bakti, Jakarta, 1999.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1991.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Kedua, Rajawali, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

- \_\_\_\_\_ dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1980.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kesebelas, 2011.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002.
- Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sulasri, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen*, dalam Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, *Lika Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, disunting oleh Arimbi, 2006.
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution (Teknik dan Strategi dalam Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase-Proses Perkembangan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, ELIPS Project, Jakarta, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoneisa, Jakarta, 1988.

- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- W. Poeggel and E. Oeser, *Methods of Diplomatic Settlement*, dalam Mohammed Bedjaoui (ed), *International Law: Achievements and Prospects*, Martinus Nijhoff and UNESCO, Dordrecht, 1991.
- Winarto Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1990.
- Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

## **B. Disertasi, Tesis, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

- Anita Afriana, Rai Mantili, dan Ema Rahmawati, *Konseptualisasi Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Small Claims Procedure di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum, volume 11, nomor 3, Desember 2018.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, Varia Peradilan, No. 248 Juli 2006.
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 13 Mei 2000.
- Elza Syarief dan Sheli Rusdiana, *Penerapan Prinsip Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, Journal of Law and Policy Transformation, Volume 1, Number 1, December 2016.
- Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 6, No. II, September 2016.
- Irvan Adi Putranto, *Kajian Hukum terhadap Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Pengadilan Negeri*, Jurnal Masalah Masalah Hukum, Jilid 48 Nomor 2, April 2019.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Laporan Akhir Analisa Pemetaan Kebutuhan Konsumen dalam Perlindungan Konsumen*, Pusat Kebijakan



*Perdagangan Dalam Negeri*, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2016.

Kurniawan, *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negara-Negara Common Law System*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No. 2, April-Juni 2014.

Kurniawan, *Permasalahan dan kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK*, Jurnal Dnamika Hukum, Volume 12, Nomor 1, Januari 2012.

Kurniawan, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala-Kendala BPSK)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No. 3 Juli-September 2011, hlm. 349. Diakses melalui <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/252/186>, pada tanggal 2 Juli 2019, pukul 16.32.

M. Taufiq Rahman, *Keadilan Sosial dalam Pemikiran Barat dan Islam (Studi Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Sayyid Quthb)*, Executive Summary Penelitian Bantuan Dana DIPA UIN SGD Bandung 2012, Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2012.

Murni dan Sri Maharani, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Konsumen*, Jurnal Arena Hukum, olume 8, Nomor 2, Agustus 2015.

Philipus M. Hardjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Jurnal Pro Justitia Tahun XVI Nimor 1 Januari 1998

Roro Fatikhin, *Keadilan Sosial dalam Perspektif Alqur'an dan Pancasila*, Jurnal Panangkaran, volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009.

\_\_\_\_\_, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007.

\_\_\_\_\_, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000.

Sientje Kurniawati, *Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Al-Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri (Analisis Putusan BPSK Tebing Tinggi Nomor:*

025/BPSK-TT/KEP.IX/2013), Jurnal Renaissance, volume 2, No.2, Agustus 2017.

Stephen Corones (*Research Co-Ordinaor*), Sharon Christensen, *at. al., Comparative Analysis of Overseas Consumer Policy Frameworks*, Faculty of Law Queensland University of Technology, April 2016, hlm. 212. Diakses melalui [http://consumerlaw.gov.au/files/2016/05/ACL\\_Comparative-analysis-overseas-consumer-policy-frameworks\\_Part6-1.pdf](http://consumerlaw.gov.au/files/2016/05/ACL_Comparative-analysis-overseas-consumer-policy-frameworks_Part6-1.pdf), pada tanggal 13 Juli 2019, pukul 10.05 WIB.

Tamah, *Rekonstruksi Pengaturan Kewenangan Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah Nasional dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, UNISSULA, Semarang, 2017.

Tanya Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, kerjasama Mahkamah Agung RI, *Japan International Cooperation Agency (JICA)* dan *Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT)*, 2008.

Ujwana Shinde, *Conciliation as an Effective Mode of Alternative Dispute Resolving System*, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (JHSS)*, Volume 4, Issue 3, Nov. - Dec. 2012.

Umi Rohmah, *Perdamaian (Islah) dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syari'ah*, Jurnal Al-'Adl, Volume 7 Nomor 1, Januari 2014.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan](#)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Pilihan Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, kota Malang, dan Kota Makassar.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya dan pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Jeneponto.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Padang, Kota Tangerang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Bandung.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Pekalongan, Kota Pare-Pare, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Batam, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Banjarmasin, Kota Cirebon, Kota Surakarta, Kota Magelang, dan Kota Tanjung Pinang, serta pada Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, dan Kabupaten Bogor.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Batu Bara.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Solok, Kota Cilegon, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Berau, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Maros.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Paser, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Cirebon, serta Kota Bandar Lampung, dan Kota Tanjung Balai.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Mappi, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Probolinggo, Kota Lubuklinggau, dan Kota Tasikmalaya.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kota Probolinggo, dan Kota Tangerang Selatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Barito Utara.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pematang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Langkat, Kota Padang Panjang, Kota Bekasi, Kota Pematangsiantar, dan Kota Salatiga.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Donggala, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palu, dan Kotamobagu.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Tomohon.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Bangka, Kabupaten Bandung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Gowa,

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan Kota Sungai Penuh.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Sibolga, dan Kota Gorontalo.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Karangasem, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Solok, Kabupaten Bungo, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Banyuwangi, Kota Gunungsitoli, Kota Lhokseumawe, Kota Payakumbuh, Kota Tarakan, Kota Bengkulu, dan Kota Pasuruan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Agam, dan Kota Pariaman.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Lebak, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Asahan, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Kapuas.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Muna, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Sintang, dan Kota Ternate.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Sekretariat BPSK.

Keputusan Menteri Perdagangan No. 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 06/M-DAG/PER/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Pengumuman OJK Nomor Peng-1/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

KUH Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Pengumuman OJK Nomor Peng-1/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 03/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Adjudikasi.

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia & Perubahannya.*

#### **D. Modul, Bahan Seminar**

Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Lindungi Konsumen, Kemendag Umumkan Hasil Pengawasan, Semester I Tahun 2015*, Siaran Pers Kementerian Perdagangan RI, 2015.

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, *Modul Workshop Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*, Jakarta, 2015.

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027*, Jakarta, 2017.

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK RI, Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Bahan Seminar, Yogyakarta, 30 Agustus 2018.

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK RI, *Bahan seminar "Perlindungan Konsumen Keuangan Indonesia"*, Bandung, Agustus 2018.

## E. Internet

Abdul Rasyid, *Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Maret 2017) diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/> pada tanggal 17 Juli 2019, pukul 6.45 WIB.

AFCA, *About AFCA*, diakses melalui <https://afca.org.au/about-afca/>, pada tanggal 12 Juli 2019, pukul 04.28 WIB.

AFCA, *The Process We Follow*, diakses melalui <https://afca.org.au/what-to-expect/the-process-we-follow/>, pada tanggal 12 Juli 2019, pukul 5.07 WIB.

Andi Saputra, *Tok! 127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA*, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3669668/tok-127-keputusan-sengketa-konsumen-dianulir-ma>, pada tanggal 9 Februari 2019, pukul 14.33 WIB.

Arsil, *Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK mengadili Sengketa Lembaga Pembiayaan dan Nasabah*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f2b4473d8f0/sikap-hukum-ma-atas-kewenangan-bpsk-mengadili-sengketa-lembaga-pembiayaan-dan-nasabah>, pada tanggal 9 Februari 2019, pukul 15.54 WIB.

Adhi S. Lukman, *Urgensi Badan Perlindungan Konsumen*, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/16/19080071/urgensi.badan.per.lindungan.konsumen> pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 12.30 WIB.

Ady Thea DA, *Menilik Peran BPKN-BPSK dalam Sengketa Kredit Kendaraan Bermotor*, hukumonline.com edisi 22 Februari 2018, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8e551510c66/menilik-peran-bpkn-bpsk-dalam-sengketa-kredit-kendaraan-bermotor>, pada tanggal 15 Oktober 2018, pukul 14.26 WIB.

Ahmad Rofiq, *Menghayati Pesan 'Umar bin Al-Khathab*, diakses melalui <http://pasca.walisongo.ac.id/?p=2671>, pada tanggal 9 Oktober 2019, pukul 3.08 WIB.

Ardiansyah Parman, Ketua BPKN, pada Ady Thea DA, *Menilik Peran BPKN-BPSK dalam Sengketa Kredit Kendaraan Bermotor*, hukumonline.com

- edisi 22 Februari 2018, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8e551510c66/menilik-peran-bpkn-bpsk-dalam-sengketa-kredit-kendaraan-bermotor>, pada tanggal 15 Oktober 2018, pukul 14.26 WIB.
- CEA, *overview*, diakses melalui <https://www.cea.gov.sg/about-us/who-we-are/overview>, pada tanggal 9 Juli 2019, pukul 14.25 WIB.
- CEA, *Dispute Resolution*, diakses melalui <https://www.cea.gov.sg/consumers/dispute-resolution>, pada tanggal 9 Juli 2019 WIB, pukul 14.30 WIB
- FIDReC, *Background*, diakses melalui <https://www.fidrec.com.sg/website/background.html>, pada tanggal 9 Juli 2019, pukul 10.45 WIB.
- FIDReC, Diakses melalui <https://www.fidrec.com.sg/website/index.html>, pada tanggal 8 Juli 2019, pukul 11.31 WIB.
- FIDReC, *Dispute Resolution Process*, diakses melalui <https://www.fidrec.com.sg/website/disputerp.html>, pada tanggal 8 Juli 2019, pukul 11.40 WIB.
- FIDReC, *FIDReC case fee structure as at 1 September 2011*, diakses melalui <https://www.fidrec.com.sg/website/caseFee.htm>, pada tanggal 8 Juli 2019, pukul 14.01 WIB
- FIDReC, *Summary of FIDReC Annual Report 2017/2018*, diakses melalui <https://www.fidrec.com.sg/website/annualreports.html>, pada tanggal 8 Juli 2019, pukul 3.25 WIB.
- Hendra Wibawa, *Konsumen Harus Berani Melawan Klausula Baku*, edisi 20 April 2019, diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190420/12/913629/konsumen-harus-berani-melawan-klausula-baku>, pada tanggal 17 Juli 2019, pukul 08.58 WIB.
- Info-communications Media Development Authority of Singapore, *About IMDA*, diakses melalui <https://www2.imda.gov.sg/Who-We-Are/about-imda>, pada tanggal 6 Juli 2019, pukul 15.33 WIB.
- Inosentius Samsul, *Menyelidik Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, diakses melalui <http://mediaindonesia.com/read/detail/183254-menyelisik-kewenangan-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen>, pada tanggal 4 Desember 2018, pukul 21.21 WIB.
- Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana Universitas Hasanuddin, *Perbedaan antara Teori Hukum Positivisme (John Austin) dengan Teori Hukum Progresif*



(Satjipto Rahardjo), diakses melalui [www.hukumpedia.com/lkmp\\_unhas/perbedaan-antara-teori-hukum-positivisme-john-austin-dengan-teori-hukum-progresif-satjipto-rahardjo](http://www.hukumpedia.com/lkmp_unhas/perbedaan-antara-teori-hukum-positivisme-john-austin-dengan-teori-hukum-progresif-satjipto-rahardjo), pada tanggal 30 April 2017 pukul 8.47 WIB.

Lona Olavia, *Pemerintah Cabut Izin BPSK Batu Bara*, diakses melalui <https://www.beritasatu.com/ekonomi/433844-pemerintah-cabut-izin-bpsk>, pada tanggal 11 Februari 2019, pukul 10.50 WIB. Lihat juga, Redaksi Tribunnews, *BPSK Batubara Tangani Sengketa Keuangan di Luar Wilayah Kerja Bikin OJK Meradang*, diakses melalui <http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/11/12/bpsk-batubara-tangani-sengketa-keuangan-di-luar-wilayah-kerja-bikin-ojk-meradang>, pada tanggal 11 Februari 2019, pukul 11.04 WIB.

Jimly Asshiddiqie, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, diakses melalui <https://books.google.com>, pada tanggal 27 Januari 2019, pukul 16.01 WIB.

Moh. Dani Pratama Huzaini, *Ini Beleid Pemerintah yang Baru tentang BPSK*, hukumonline edisi 27 Februari 2019, diakses <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a94c7b618573/ini-beleid-pemerintah-yang-baru-tentang-bpsk>, pada tanggal 28 Maret 2019, pukul 11.35 WIB.

Muslimpro, edisi Sabtu, 18 Mei 2019, *Top 10 Populasi Umat Musli Terbesar di Dunia*, diakses melalui <https://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087-Top-10-Populasi-Umat-Muslim-Terbesar-di-Dunia>, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 10.46 WIB.

Pramdia Arhando Julianto, *Konsumen di Indonesia Dinilai Belum Berdaya*, Kompas Edisi 19 September 2017, diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/19/050000826/konsumen-di-indonesia-dinilai-belum-berdaya>, pada tanggal 11 Januari 2019, pukul 10.53 WIB.

Shidarta, *Mampukah BPSK Mengawasi Pencantuman Klausula Baku?*, November 2018, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2018/11/05/mampukah-bpsk-mengawasi-pencantuman-klausula-baku/>, pada tanggal 2 Juli 2019, pukul 10.16 WIB.

Shidarta, *Kewenangan BPSK versus LAPS-OJK*, diakses melalui <http://business-law.binus.ac.id/2018/08/18/kewenangan-bpsk-versus-laps-ojk/>, pada tanggal 11 Februari 2019, pukul 15.20 WIB

Shidarta, *BPSK di Tengah Pergeseran Kewenangan Penganggaran*, November 2017, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/bpsk-di-tengah-pergeseran-kewenangan-penganggaran/>, pada tanggal 22 Juli 2019, pukul 03.22 WIB.

- Shidarta, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen: Seberapa Greget?*, November 2018, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2018/11/05/badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-seberapa-greget/>, pada tanggal 19 Juli 2019, pukul 10.00 WIB.
- Sarah Rahma Agustin, *Hari Pelanggan Nasional, YLKI: Indeks Keberdayaan Konsumen Rendah*, Edisi 4 September 2018, diakses melalui <https://tirto.id/hari-pelanggan-nasional-ylki-indeks-keberdayaan-konsumen-rendah-cWRF>, pada tanggal 11 Januari 2019, pukul 10.45 WIB.
- Sylke Febrina Laucereno, *RI Berpotensi Jadi Pusat Ekonomi Syariah*, Detik Finance, edisi Jumat, 3 November 2017, diakses melalui <https://finance.detik.com/moneter/d-3712632/ri-berpotensi-jadi-pusat-ekonomi-syariah-dunia>, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 10.25 WIB.
- Safyra Primadyata, *BI Berambisi Indonesia Jadi Pusat ekonomi Syariah Dunia 2024*, CNN Indonesia, edisi Rabu, 8 November 2017, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171108190918-78-254412/bi-berambisi-indonesia-jadi-pusat-ekonomi-syariah-dunia-2024>, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 10.33 WIB.
- MAS, *Who We Are*, diakses melalui <https://www.mas.gov.sg/who-we-are>, pada tanggal 8 Juli 2019, pukul 11.25 WIB.
- Media Konsumen, *Tahun 2016 Konsumen Indonesia Makin Tak Berdaya*, Edisi 19 September 2017, diakses melalui <https://mediakonsumen.com/2017/09/19/berita-konsumen/tahun-2016-konsumen-indonesia-makin-tidak-berdaya>, pada tanggal 11 Januari 2019, pukul 11.23 WIB.
- Rayful Mudassir, *Perlindungan Konsumen: Indeks Pemberdayaan Ditarget 41%*, diakses melalui <https://kalimantan.bisnis.com/read/20171228/448/721634/perlindungan-konsumen-indeks-pemberdayaan-ditarget-41>, Edisi 28 Desember 2017, pada tanggal 11 Januari 2019, pukul 12.05 WIB.
- Today Online Singapore, *Cheaper way for consumers to resolve disputes with telcos could be up by end-2018*, Edisi 17 Januari 2017, diakses melalui <https://www.todayonline.com/singapore/cheaper-way-consumers-resolve-disputes-telcos-could-be-end-2018>, pada tanggal 6 Juli 2019, pukul 16.13 WIB.
- Tri Jaya Ayu Pamesti, *Arti, Tujuan, Lingkup, dan Contoh Diskresi*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b538f5f35f5/arti--tujuan--lingkup--dan-contoh-diskresi/>, pada tanggal 9 Oktober 2019, pukul 10.09 WIB.

<http://bpkn.go.id/>

<http://www.consumersinternational.org/>

<http://kbbi.web.id/>

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

<http://ylki.or.id/>

<https://www.mahkamahagung.go.id/>

<https://id.wikipedia.org/>

<http://www.bapmi.org/>

<https://www.hukumonline.com/>

<http://islamkono.com/>

## **F. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 731 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 73 K/Pdt.Sus-BPSK/2018.

Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Bkt tanggal 14 November 2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/Pdt.Sus-BPSK/2018.

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Perkara Nomor 02/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 866 K/Pdt.Sus-BPSK/2018.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 87/Pdt.Sus/2016/PN Psp.

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Rap.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 149/Pdt.G/BPSK/2011/PN.Ska.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/Pdt.Sus/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 477 K/Pdt.Sus/2011.